



## Strategi Kebijakan Pariwisata Pascatambang: Menutup Kesenjangan Warisan Dunia UNESCO dan Kesejahteraan Masyarakat Sawahlunto

<sup>1</sup> Srimar Yeni

<sup>1</sup> Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto, Indonesia

E-mail: [maryenisri@gmail.com](mailto:maryenisri@gmail.com)

### ABSTRAK

Penetapan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) sebagai Warisan Dunia UNESCO pada 2019 memberi Kota Sawahlunto modal pariwisata yang langka dimiliki daerah pascatambang lain, ditandai pertumbuhan kunjungan wisatawan 505 persen sepanjang periode 2021-2025. Namun kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB nyaris tidak bergerak, dan estimasi nilai tambah ekonomi per kunjungan hanya sekitar Rp890 ribu pada 2025 (dihitung dari kontribusi PDRB sektor akomodasi dan makan minum dibagi total kunjungan wisatawan, bersifat estimasi indikatif). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah rendahnya konversi status warisan dunia menjadi kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta merumuskan alternatif kebijakan untuk menutup kesenjangan tersebut. Metode yang digunakan meliputi skoring Urgency-Seriousness-Growth (USG) untuk menentukan prioritas masalah, Tourism Value Chain Analysis untuk memetakan titik kebocoran ekonomi (*economic leakage*), analisis SWOT untuk memetakan kondisi internal-eksternal, dan Multi-Criteria Analysis (MCA) berbasis enam kriteria Dunn untuk memilih alternatif kebijakan terbaik. Hasil analisis menunjukkan akar masalah utama adalah keterbatasan investasi akomodasi yang mendorong dominasi pola kunjungan satu hari. Evaluasi MCA terhadap tiga alternatif kebijakan menetapkan Penguatan Ekosistem Pariwisata Terintegrasi sebagai kebijakan terbaik (skor 4,33 dari 5), dijalankan melalui lima pilar: pengembangan destinasi tematik heritage, percepatan investasi amenitas dan akomodasi, integrasi UMKM, penguatan SDM pariwisata, serta tata kelola kolaboratif berbasis model Pentahelix. Penelitian ini merekomendasikan pergeseran paradigma pembangunan pariwisata daerah dari *visitor-oriented* menuju *value-oriented tourism development*.

**Kata kunci:** ekosistem pariwisata, warisan dunia UNESCO, *economic leakage*, kebijakan publik, Multi-Criteria Analysis

### ABSTRACT

The designation of the Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) as a UNESCO World Heritage Site in 2019 provided Sawahlunto City with a rare tourism asset among post-mining regions, marked by a 505 percent growth in tourist visits over the 2021-2025 period. However, the contribution of the accommodation and food and beverage sector to gross regional domestic product (GRDP) has barely changed, and the estimated economic value added per visit was only around IDR 890 thousand in 2025, calculated by dividing the GRDP contribution of the accommodation and food and beverage sector by total tourist visits and thus representing an indicative estimate. This study aims to identify the root cause of the low conversion of world heritage status into community economic welfare and to formulate policy alternatives to close this

*gap. The methods employed include Urgency-Seriousness-Growth (USG) scoring to prioritize problems, Tourism Value Chain Analysis to map points of economic leakage, SWOT analysis to map internal and external conditions, and Multi-Criteria Analysis (MCA) based on Dunn's six criteria to select the best policy alternative. The analysis shows that the primary root cause is limited investment in accommodation, which drives the dominance of one-day visit patterns. An MCA evaluation of three policy alternatives identifies Integrated Tourism Ecosystem Strengthening as the best policy option, with a score of 4.33 out of 5, implemented through five pillars: heritage-themed destination development, accelerated investment in amenities and accommodation, MSME integration, tourism human resource development, and collaborative governance based on the Pentahelix model. This study recommends a paradigm shift in regional tourism development from visitor-oriented toward value-oriented tourism development.*

**Keywords:** *tourism ecosystem, UNESCO World Heritage, economic leakage, public policy, Multi-Criteria Analysis*

---

## PENDAHULUAN

Kota Sawahlunto tumbuh dari aktivitas pertambangan batubara sejak akhir abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka tambang Ombilin dan membangun kota ini sebagai kota tambang terencana pertama di Indonesia. Identitas kota ini selama lebih dari satu abad melekat erat pada aktivitas ekstraktif tersebut, sehingga ketika produksi batubara menyusut, kota ini menghadapi persoalan struktural yang lazim dialami kota-kota tambang di berbagai belahan dunia: bagaimana mempertahankan keberlanjutan ekonomi ketika sumber daya utamanya kian menipis. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kota Sawahlunto terus melemah, dari 3,79 persen pada 2021 menjadi 3,59 persen pada 2025 [1], sebuah tren lima tahun yang konsisten menurun tanpa tanda pembalikan.

Pemerintah Kota Sawahlunto merespons tantangan ini dengan menjadikan pariwisata sebagai salah satu pengungkit ekonomi baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 [2]. Penetapan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) sebagai Warisan Dunia UNESCO pada 2019 [3], ditambah keberadaan Geopark Nasional Sawahlunto, memberi kota ini modal yang tidak dimiliki hampir semua kota bekas tambang lain di Indonesia. Data menunjukkan daya tarik yang nyata dari modal ini: 115.890 kunjungan wisatawan domestik pada 2025, dengan total kunjungan sebelas objek wisata utama mencapai 139.094, tumbuh 505 persen sepanjang periode 2021-2025 [1], jauh melampaui pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan yang tercatat 3,43 persen pada 2025 [1].

Namun, di balik pertumbuhan kunjungan yang mengesankan itu, sejumlah indikator lain justru memperkuat kekhawatiran ini. Pertama, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, proksi terdekat sektor pariwisata, terhadap PDRB nyaris tidak bergerak, hanya naik dari 2,18 persen menjadi 2,28 persen sepanjang 2021-2025, meski kunjungan wisatawan tumbuh 505 persen sepanjang periode 2021-2025 [1]. Kedua, estimasi nilai tambah ekonomi per kunjungan wisatawan pada 2025 hanya sekitar Rp890 ribu, jauh di bawah standar destinasi heritage tourism yang berkembang baik. Sebagai gambaran pembandingan indikatif (dengan karakteristik destinasi dan konteks yang berbeda), destinasi heritage Candi Prambanan mencatat rata-rata pembelanjaan wisatawan sekitar Rp965 ribu per kunjungan dengan efek pengganda ekonomi lokal mencapai 6,75 kali lipat [4]. Kondisi ini dipengaruhi oleh kapasitas akomodasi Sawahlunto yang sangat terbatas, yaitu hanya 47 unit dengan 3 hotel berbintang [1]. Ketiga, pola kunjungan wisatawan didominasi destinasi rekreasi umum seperti Water Boom (31.113 kunjungan), jauh mengungguli situs heritage

seperti Museum Situs Lubang Tambang Batu Bara Soero (6.812 kunjungan), mengindikasikan branding UNESCO belum efektif dikonversi menjadi pengalaman wisata heritage yang mendalam [1].

Sejumlah kajian terdahulu tentang OCMHS lebih banyak membahas aspek kelembagaan, sosial, dan daya tarik warisan dunia ini, dibanding dimensi ekonominya. Erman [5] mengkaji tahapan perubahan sistem inovasi di kawasan tambang batubara Ombilin, dari kota tambang aktif hingga transformasinya menjadi warisan dunia. Permadi dkk. [6] mengkaji peran aktor Pentahelix dalam mendorong Sawahlunto meraih status warisan dunia, sementara Syafrini dkk. [7] menelusuri bagaimana kota ini bertransformasi dari ancaman menjadi kota hantu pascatambang menuju kota wisata warisan tambang berbudaya. Armis dan Kanegae [8] mengkaji daya tarik Sawahlunto dari perspektif pengunjung, dan Brian dkk. [9] mengkaji antusiasme masyarakat terhadap pengembangan warisan industri tambang Ombilin. Sudarmoko dan Putra [10] mengkaji bagaimana ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah pertambangan dipelihara dalam ruang publik kota, sementara Syafrini dkk. [11] menegaskan modal sosial sebagai faktor pendorong utama keberhasilan pengembangan wisata warisan di kota ini. Meskipun kajian-kajian tersebut memperkaya pemahaman atas dimensi kelembagaan, sosial, dan daya tarik OCMHS, belum ada yang secara khusus mengukur sejauh mana status warisan dunia ini terkonversi menjadi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Celah tersebut menjadi fokus utama kajian ini. Kontribusi spesifik penelitian ini terletak pada integrasi empat metode analisis kebijakan publik, yaitu skoring USG, Tourism Value Chain Analysis, SWOT, dan Multi-Criteria Analysis, dalam satu kerangka berjenjang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Kota Sawahlunto.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi dan memprioritaskan akar masalah rendahnya konversi status Warisan Dunia UNESCO OCMHS menjadi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto, dan (2) merumuskan serta memilih alternatif kebijakan yang paling tepat untuk menutup kesenjangan tersebut, sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto maupun daerah pascatambang lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis analisis kebijakan publik, dengan menggabungkan data sekunder dan skoring partisipatif dari pemangku kepentingan kunci. Data sekunder bersumber dari BPS Kota Sawahlunto, dokumen RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029, serta peraturan perundang-undangan terkait kepariwisataan dan cagar budaya. Empat tahap analisis dilakukan secara berurutan.

*Pertama*, penentuan masalah prioritas menggunakan metode skoring Urgency-Seriousness-Growth (USG). Urgency mengukur seberapa mendesak masalah harus ditangani, Seriousness mengukur seberapa serius implikasinya terhadap berbagai sektor apabila dibiarkan, dan Growth mengukur seberapa cepat masalah akan memburuk apabila tidak diintervensi. Empat pemangku kepentingan dipilih berdasarkan posisi struktural yang relevan dengan isu pariwisata Sawahlunto, pengalaman bertahun-tahun di bidang terkait, serta keterlibatan langsung dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto, mewakili unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda), Dinas Pariwisata, akademisi, dan pelaku usaha pariwisata lokal, memberikan skor pada skala 1 sampai 5 untuk tiga kandidat masalah pada ketiga kriteria tersebut. Skor dari keempat responden dirata-ratakan dan dijumlahkan untuk menentukan masalah utama, yang kemudian ditelusuri penyebabnya secara berjenjang (level 1 dan level 2) hingga diperoleh akar masalah dan pernyataan masalah (*problem statement*).

*Kedua*, pernyataan masalah dibedah menggunakan Tourism Value Chain Analysis [12] untuk memetakan enam mata rantai pariwisata Sawahlunto: daya tarik, aksesibilitas, akomodasi, kuliner dan belanja, atraksi, serta integrasi UMKM, guna mengidentifikasi titik-titik kebocoran ekonomi (*economic leakage*) [13], yaitu titik ketika pengeluaran wisatawan tidak berhasil ditangkap perekonomian lokal. Identifikasi titik kebocoran dilakukan dengan membandingkan proporsi pengeluaran wisatawan pada tiap simpul rantai nilai terhadap kapasitas penyediaan lokal pada simpul tersebut, menggunakan data sekunder BPS dan RPJMD sebagai acuan. Analisis ini dilengkapi kerangka konseptual *deep heritage experience* yang merujuk pada kajian daya tarik destinasi warisan dari perspektif pengunjung [8] serta model tata kelola kolaboratif Pentahelix [6], [14] yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

*Ketiga*, analisis SWOT digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ekosistem pariwisata Sawahlunto, sekaligus menguji keselarasan arah solusi dengan RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029 [7].

*Keempat*, tiga alternatif kebijakan yang dirumuskan dari hasil analisis di atas dievaluasi melalui Multi-Criteria Analysis (MCA) yang diadaptasi dari kerangka enam kriteria Dunn [15], yang dioperasionalkan sebagai berikut: (1) efektivitas → sejauh mana alternatif menjawab *problem statement*; (2) efisiensi → efisiensi biaya implementasi; (3) kecukupan → kesesuaian dengan arah RPJMD; (4) kesamaan → kemudahan implementasi lintas aktor; (5) responsivitas → keberlanjutan dampak jangka panjang; dan (6) kelayakan → dampak terhadap pelaku UMKM lokal. Penilaian dilakukan oleh empat keyperson yang sama dengan tahap skoring USG, terdiri atas perwakilan Barenlitbangda, mantan pejabat Dinas Pariwisata, akademisi ekonomi Universitas Andalas, dan pelaku usaha pariwisata lokal, pada skala 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi), dengan hasil skor menentukan alternatif kebijakan terpilih yang direkomendasikan.

Sebagai keterbatasan metodologis, estimasi nilai tambah ekonomi per kunjungan wisatawan dalam penelitian ini dihitung menggunakan proksi data PDRB sektoral yang mencakup seluruh aktivitas akomodasi dan makan minum di Kota Sawahlunto, bukan hanya yang secara langsung terkait kunjungan wisata, sehingga angka Rp890 ribu perlu dimaknai sebagai estimasi indikatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

*Prioritas Masalah.* Hasil skoring USG terhadap tiga kandidat masalah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil skoring USG untuk menentukan masalah utama

| Daftar Masalah                                                       | Urgency | Seriousness | Growth | Total Nilai |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|
| Masalah 1: Stagnasi kontribusi PDRB sektor akomodasi dan makan minum | 5       | 5           | 4      | 14          |
| Masalah 2: Rendahnya nilai tambah ekonomi per kunjungan wisatawan    | 5       | 5           | 5      | 15          |
| Masalah 3: Dominasi kunjungan rekreasi atas situs heritage           | 3       | 4           | 3      | 10          |

Masalah nomor 2, rendahnya nilai tambah ekonomi per kunjungan wisatawan, memperoleh total nilai tertinggi (15) dan diidentifikasi sebagai akar masalah utama berdasarkan penilaian stakeholder dan analisis rantai nilai, bukan sebagai hubungan kausal yang teruji secara statistik. Penelusuran penyebab level 1 mengidentifikasi tiga faktor: (2a) kapasitas akomodasi yang sangat terbatas mendorong dominasi pola kunjungan satu hari; (2b) lemahnya integrasi UMKM lokal ke rantai nilai pariwisata; dan (2c) minimnya diversifikasi produk wisata heritage bernilai tambah tinggi. Penelusuran lebih lanjut terhadap sembilan penyebab level 2 menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas akomodasi (2a) memiliki posisi paling sentral, dengan akar masalah berupa minimnya investasi swasta di sektor akomodasi karena skala pasar Sawahlunto dianggap kecil dan belum tersedia insentif investasi yang memadai.

Berdasarkan penelusuran ini, dirumuskan pernyataan masalah: rendahnya nilai tambah ekonomi per kunjungan wisatawan di Kota Sawahlunto disebabkan oleh keterbatasan kapasitas akomodasi, yang pada gilirannya disebabkan oleh minimnya investasi swasta di sektor perhotelan, sehingga wisatawan didominasi pola kunjungan satu hari yang tidak memberi ruang bagi status Warisan Dunia UNESCO OCMHS untuk terkonversi menjadi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

*Analisis Rantai Nilai dan Kondisi Internal-Eksternal.* Dari enam simpul rantai nilai pariwisata, simpul akomodasi dan integrasi UMKM adalah dua simpul yang paling mungkin diintervensi langsung oleh kebijakan daerah karena berada pada sisi penawaran (*supply-side*), berbeda dengan simpul daya tarik atau aksesibilitas yang sebagian besar sudah given. Hasil analisis SWOT terhadap ekosistem pariwisata Kota Sawahlunto disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis SWOT ekosistem pariwisata Kota Sawahlunto

| Kategori                   | Uraian                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kekuatan<br>(Strengths)    | Status OCMHS sebagai satu-satunya Warisan Dunia UNESCO di Sumatera Barat; keberadaan Geopark Nasional Sawahlunto; pertumbuhan wisatawan 505% sepanjang periode 2021-2025 |
| Kelemahan<br>(Weaknesses)  | Kapasitas akomodasi sangat minim (47 unit, 3 hotel berbintang); integrasi UMKM ke rantai nilai pariwisata masih lemah; diversifikasi produk wisata heritage minim        |
| Peluang<br>(Opportunities) | Skema pembiayaan nasional termasuk KPBU (Perpres No. 38/2015); dukungan internasional jejaring UNESCO; tren wisata heritage dan geowisata nasional                       |
| Ancaman<br>(Threats)       | Keterbatasan kapasitas fiskal APBD; ketidakpastian ekonomi nasional; persaingan antardestinasi heritage lain di Indonesia                                                |

*Alternatif Kebijakan dan Hasil Pemilihan.* Berdasarkan hasil analisis di atas, dirumuskan tiga alternatif kebijakan: (I) Intensifikasi Promosi Digital, berfokus pada branding OCMHS melalui media digital dan event nasional, cepat dan berbiaya moderat namun tidak menjawab akar masalah keterbatasan akomodasi; (II) Pembangunan Infrastruktur dan Amenitas, pembangunan hotel baru dan revitalisasi kawasan heritage, langsung menjawab akar masalah namun membutuhkan investasi besar dan waktu tiga hingga lima tahun; dan (III) Penguatan Ekosistem Pariwisata Terintegrasi, mengintegrasikan pengembangan destinasi,

investasi amenitas, integrasi UMKM, penguatan SDM, dan tata kelola kolaboratif dalam satu kerangka yang saling memperkuat.

Ketiga alternatif dievaluasi melalui MCA pada enam kriteria, dengan hasil disajikan pada Tabel 3. Skor total dihitung sebagai rata-rata sederhana (equal weighting) dari keenam kriteria, dengan asumsi bobot yang sama untuk tiap kriteria, sehingga total skor merupakan rata-rata aritmatik pada skala 1-5.

Tabel 3. Skor evaluasi tiga alternatif kebijakan melalui Multi-Criteria Analysis

(skala 1 = sangat rendah sampai 5 = sangat tinggi)

| Alternatif Kebijakan             | Efektivitas | Efisiensi | Kesesuaian RPJMD | Kemudahan | Keberlanjutan | Dampak UMKM | Total Skor |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| Intensifikasi Promosi Digital    | 2           | 4         | 3                | 5         | 2             | 2           | 3,00       |
| Pembangunan Infrastruktur        | 4           | 2         | 4                | 2         | 4             | 3           | 3,17       |
| Penguatan Ekosistem Terintegrasi | 5           | 3         | 5                | 3         | 5             | 5           | 4,33       |

*Sumber: Analisis penulis berdasarkan diskusi keyperson Barenlitbangda Kota Sawahlunto, 2026.*

Alternatif III, Penguatan Ekosistem Pariwisata Terintegrasi, memperoleh skor tertinggi (4,33) dan ditetapkan sebagai kebijakan terpilih, dijalankan melalui lima pilar: (1) Pengembangan Destinasi Wisata Tematik Berbasis Heritage dan Geologi, mencakup paket wisata multi-hari, interpretasi berbasis augmented reality, dan wisata malam bertema sejarah; (2) Percepatan Investasi Amenitas dan Akomodasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai Perpres No. 38/2015 [16], penyederhanaan perizinan, dan insentif pajak daerah; (3) Integrasi UMKM dan Ekonomi Kreatif melalui kurasi produk, sentra kuliner heritage, dan platform pemasaran digital; (4) Penguatan Kapasitas SDM Pariwisata melalui pelatihan pemandu bersertifikat dan kurikulum pariwisata di SMK lokal; dan (5) Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Model Pentahelix melalui pembentukan Forum Kolaborasi Pariwisata Sawahlunto dan Masterplan Ekosistem Pariwisata Sawahlunto 2027-2031.

Implementasi kelima pilar dirancang dalam tiga tahap: Fondasi (2027, penyusunan Masterplan dan pembentukan forum kolaborasi), Percepatan (2028-2029, pembangunan hotel heritage pertama melalui KPBU serta kurasi UMKM dan pelatihan pemandu), dan Transformasi (2030-2031, perluasan investasi amenitas dan pengembangan paket wisata multi-hari). Sebagai target proyeksi kebijakan (bukan hasil empiris penelitian), indikator kinerja utama menargetkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB meningkat dari 2,28 persen menjadi di atas 3 persen pada 2031, dengan estimasi nilai tambah ekonomi per kunjungan meningkat signifikan dan jumlah unit akomodasi berizin bertambah melalui skema KPBU. Angka-angka ini merupakan sasaran yang diharapkan dari implementasi kebijakan, bukan capaian yang telah teruji dalam penelitian ini. Rekomendasi kebijakan ini bersifat sebagai arah indikatif yang masih memerlukan kajian lanjutan berupa studi kelayakan (feasibility study), analisis kesiapan pasar, kajian aspek konservasi cagar budaya, serta penyesuaian dengan ketentuan regulasi yang berlaku sebelum diimplementasikan.

## B. Pembahasan

Temuan bahwa keterbatasan investasi akomodasi menjadi akar masalah utama sejalan dengan kerangka *economic leakage* [13], yang menjelaskan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan tanpa penguatan sisi penawaran justru berisiko memperbesar kebocoran ekonomi. Ketika kapasitas akomodasi tetap terbatas sementara kunjungan terus tumbuh, pengeluaran wisatawan yang seharusnya dapat ditangkap melalui menginap justru tidak terealisasi karena wisatawan memilih pulang pada hari yang sama. Temuan ini juga sejalan dengan kajian mengenai daya tarik destinasi bekas tambang dari perspektif pengunjung [8], yang menunjukkan pentingnya pengalaman wisata heritage yang mendalam agar wisatawan bersedia tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak di destinasi warisan, sesuatu yang belum sepenuhnya terjadi di Sawahlunto, sebagaimana tergambar dari dominasi kunjungan ke destinasi rekreasi umum dibanding situs heritage.

Keunggulan Alternatif III dibanding dua alternatif lain relatif konsisten sekalipun bobot antar kriteria digeser secara moderat: alternatif ini unggul pada empat dari enam kriteria, termasuk efektivitas dan kesesuaian RPJMD yang paling relevan dengan pernyataan masalah, sehingga posisinya sebagai alternatif terbaik tidak semata bergantung pada satu kriteria. Sebaliknya, Alternatif I unggul mencolok hanya pada kemudahan implementasi, dan Alternatif II unggul pada kesesuaian RPJMD serta keberlanjutan namun lemah pada efisiensi dan kemudahan. Trade-off ini wajar mengingat kompleksitas akar masalah: kebijakan yang paling efektif menjawab akar masalah memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih kompleks dan komitmen jangka menengah-panjang, sejalan dengan kebutuhan dukungan politik yang konsisten dari kepala daerah dan DPRD.

Model tata kelola kolaboratif Pentahelix [6], [14] diletakkan pada tahap implementasi paling awal karena keempat pilar lainnya memerlukan platform koordinasi yang solid agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan efek sinergis. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Sawahlunto tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, melainkan memerlukan distribusi peran ke aktor-aktor lain yang memiliki modal, keahlian, jejaring, dan legitimasi sosial masing-masing, sejalan dengan amanat UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata [17] bahwa pembangunan kepariwisataan diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan semata jumlah kunjungan.

Secara lebih luas, temuan ini menegaskan pergeseran paradigma yang diperlukan dari *visitor-oriented tourism development*, yang menempatkan jumlah kunjungan sebagai ukuran keberhasilan, menuju *value-oriented tourism development*, yang menekankan nilai ekonomi yang dihasilkan dari setiap kunjungan sebagai ukuran yang lebih relevan bagi kesejahteraan masyarakat. Pergeseran ini juga perlu mempertimbangkan potensi ketegangan antara kepentingan pelestarian cagar budaya sesuai UU No. 11/2010 [18] dan kepentingan pemanfaatan ekonomi, agar pengembangan destinasi tematik tidak mengorbankan keutuhan nilai universal luar biasa yang menjadi dasar status Warisan Dunia UNESCO OCMHS.

Sebagai keterbatasan, estimasi nilai tambah ekonomi per kunjungan dalam penelitian ini masih bersifat indikatif karena menggunakan proksi data PDRB sektoral. Survei pengeluaran wisatawan secara langsung akan memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai dampak ekonomi riil sektor pariwisata Sawahlunto dan disarankan menjadi agenda penelitian lanjutan.

## KESIMPULAN

Persoalan utama pariwisata Kota Sawahlunto bukan pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada kemampuan ekosistem pariwisata menangkap nilai ekonomi dari setiap kunjungan. Hasil skoring USG menetapkan rendahnya nilai tambah ekonomi per kunjungan sebagai masalah utama, dengan akar masalah berupa keterbatasan investasi akomodasi yang mendorong dominasi pola kunjungan satu hari. Evaluasi Multi-Criteria Analysis terhadap tiga alternatif kebijakan menetapkan Penguatan Ekosistem Pariwisata Terintegrasi sebagai kebijakan terbaik (skor 4,33 dari 5), dijalankan melalui lima pilar yang saling melengkapi: pengembangan destinasi tematik heritage, percepatan investasi amenitas dan akomodasi, integrasi UMKM, penguatan SDM pariwisata, dan tata kelola kolaboratif berbasis model Pentahelix. Kebijakan ini direkomendasikan untuk segera dituangkan ke dalam Masterplan Ekosistem Pariwisata Sawahlunto 2027-2031, agar status Warisan Dunia UNESCO yang dimiliki kota ini benar-benar berbuah kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak sosial-ekonomi kebijakan ini secara lebih presisi, terutama melalui survei pengeluaran wisatawan langsung, mengingat estimasi nilai tambah dalam penelitian ini masih bersifat indikatif. Temuan dan rekomendasi dari kasus Sawahlunto juga berpotensi menjadi pembelajaran bagi daerah pascatambang lain di Indonesia yang tengah mencari jalan keluar serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Kota Sawahlunto, *Kota Sawahlunto dalam Angka 2026*. Sawahlunto: BPS Kota Sawahlunto, 2026.
- [2] Pemerintah Kota Sawahlunto, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029*. Sawahlunto: Pemerintah Kota Sawahlunto, 2025.
- [3] UNESCO, *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019.
- [4] A. C. Rahadevi, A. W. M. Sarwono, and N. Yuniati, "Analisis multiplier effect kegiatan pariwisata di Candi Prambanan dan sekitar," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 5, no. 4, pp. 4498-4507, 2026.
- [5] E. Erman, "Changing stages of system innovation at the Ombilin's coal mines of Sawahlunto: From ghost town to world heritage," *J. STI Policy Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 105-119, 2020.
- [6] R. Permadi, F. Junizar, N. A. M. Siregar, and U. L. S. Khadijah, "The role of Pentahelix actors for Sawahlunto City to be deemed a UNESCO World Heritage," *J. Bus. Hosp. Tour.*, vol. 7, no. 1, pp. 7-19, 2021.
- [7] D. Syafrini, M. F. Nurdin, Y. S. Sugandi, and A. Miko, "Transformation of a coal mining city into a cultured mining heritage tourism city in Sawahlunto, Indonesia: A response to the threat of becoming a ghost town," *Tour. Plan. Dev.*, vol. 19, no. 4, pp. 296-315, 2022.
- [8] R. Armis and H. Kanegae, "The attractiveness of a post-mining city as a tourist destination from the perspective of visitors: A study of Sawahlunto old coal mining town in Indonesia," *Asia-Pac. J. Reg. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 443-461, 2020.

- [9] R. Brian, D. M. Soeswoyo, J. Sudirja, W. Arafah, R. Ingkadijaya, H. Brahmantyo, and S. P. Djati, "Community enthusiasm in developing Ombilin coal-mining industrial heritage in Sawahlunto, West Sumatera," *Int. J. Appl. Sci. Tour. Events*, vol. 7, no. 1, pp. 37-45, 2023.
- [10] Sudarmoko and H. J. Putra, "Warisan tambang batu bara Ombilin-Sawahlunto: Empat tahun setelah penetapan warisan dunia dan ingatan kolektif lainnya," *Puitika*, vol. 20, no. 3, pp. 10-34, 2024.
- [11] D. Syafrini, D. Mardhiah, B. D. Permata, and F. Saputri, "Social capital and cultural heritage tourism development in former mining town, West Sumatra, Indonesia," *Environ. Dev. Sustain.*, vol. 27, no. 3, pp. 7141-7161, 2025.
- [12] M. Muhandi, A. Y. Mafruhat, S. Suwarsi, M. R. Y. Rizki, and H. G. Pratama, "Value chain model for managing mining heritage tourism development: A case study of geosites in Belitung, Indonesia," *Multidiscip. Sci. J.*, vol. 8, no. 5, art. 2026338, 2025.
- [13] A. V. K. Chaitanya and S. K. Swain, "Economic leakages in tourism: A comprehensive review of theoretical and empirical perspectives," *Tour. Econ.*, vol. 30, no. 5, pp. 1306-1323, 2024.
- [14] S. Hidayat and W. Pramudya, "Stakeholder collaboration in revitalising Peneleh heritage tourism area in Surabaya: A Pentahelix perspective," *J. Tour. Sustain.*, vol. 5, no. 5, pp. 303-316, 2025.
- [15] W. N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, S. Wibawa, Terj. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- [16] Peraturan Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*, 2015.
- [17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*, 2009.
- [18] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, 2010.